

Jurnal ARIF RAHMAN HAKIM.docx

by

Submission date: 03-Aug-2023 09:16AM (UTC-0700)

Submission ID: 2140880682

File name: Jurnal ARIF RAHMAN HAKIM.docx (83.87K)

Word count: 2840

Character count: 21206

RELASI GENDER DALAM PELAKSANAAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PADA KELUARGA BANGSAWAN DI DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH

Arif Rahman Hakim¹, Hamidsyukrie², Suud³

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram
arifrahmanhakim0597@gmail.com, hamidsyukrie@unram.ac.id, suudfkip@gmail.com,

ABTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui relasi gender dalam keluarga bangsawan. 2) Mengetahui hak reproduksi perempuan pada keluarga bangsawan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dan informan. Data dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antar laki-laki dan perempuan dalam keluarga bangsawan tidak bisa dikatakan sejajar. Hal tersebut terjadi dikarenakan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Segala pengambilan keputusan akan ditentukan oleh laki-laki dengan segala pertimbangannya. Perempuan hanya boleh memberikan pendapat dan saran tanpa diizinkan untuk menentukan keputusan sendiri. Hak reproduksi pada perempuan dalam keluarga bangsawan dikesampingkan oleh kekuasaan kaum laki-laki, seperti halnya hak untuk menentukan keputusan sendiri, hak untuk memiliki anak, hak untuk menentukan jeda waktu kapan memiliki anak, maupun hak untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan organ reproduksinya.

Kata kunci : Relasi gender; Reproduksi; Keluarga Bangsawan

Arif Rahman Hakim¹, Hamidsyukrie², Suud³.¹ Relasi Gender Dalam Pelaksanaan Hak Reproduksi Perempuan Pada Keluarga Bangsawan Di Desa Puyung Kec. Jonggat Lombok Tengah.

GENDER RELATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF WOMEN'S REPRODUCTIVE RIGHTS IN THE NOBLE FAMILY IN PUYUNG VILLAGE, JONGGAT SUB-DISTRICT, LOMBOK CENTRAL.

Arif Rahman Hakim¹, Hamidsyukrie², Suud³.

Sociology Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of Mataram

arifrahmanhakim0597@gmail.com, hamidsyukrie@unram.ac.id, suudfkip@gmail.com,

ABSTRACT

This study aims to 1) Know gender relations in noble families. 2) Know the reproductive rights of women in noble families. This research was conducted using a qualitative approach with the case study method. The types of data taken in this study are primary and secondary data. Sources of data in this study are subjects and informants. Data was collected using interview, observation and documentation techniques. The data were analyzed with the stages of data reduction, data presentation and data verification as well as drawing conclusions. The results of this study indicate that the relationship between men and women in aristocratic families cannot be said to be equal. This happens because the position of men is higher than women. All decision making will be determined by men with all their consideration. Women are only allowed to give opinions and suggestions without being allowed to make their own decisions. The reproductive rights of women in aristocratic families were sidelined by the power of men, such as the right to make their own decisions, the right to have children, the right to determine when to have children, and the right to obtain information regarding the health of their reproductive organs.

Keywords: Gender relations; Reproduction; Noble Family

1. Pendahuluan

Perbedaan gender merupakan produk pemaknaan masyarakat pada kondisi sosial budaya tertentu mengenai sifat, status, posisi peran laki-laki dan perempuan terkait ciri-ciri biologisnya. Hak reproduksi adalah hak perempuan untuk bebas dalam kontrol terhadap tubuhnya sendiri, mendapatkan perlakuan baik dalam memfungsikan alat reproduksinya dan mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Di Indonesia kesehatan reproduksi masih menjadi hal yang perlu diperhatikan dimana kesehatan reproduksi masih sangat baru di kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Rangkaian upaya untuk melepaskan perempuan dari rasa takut, tertekan dan terbebaskan dari tindakan kekerasan dan kesempatan untuk menggunakan hak seluas-luasnya untuk menentukan kapan dan akan mempunyai anak serta menentukan jumlah anak.

Lombok Tengah khususnya Desa Puyung Kecamatan Jonggat merupakan daerah dengan adat istiadat serta kebudayaan yang masih sangat melekat pada masyarakatnya. Dari hasil survey bersama penduduk di desa Puyung sekitar 10.000 jiwa yang wajib pilih di tahun 2022. Bangsawan Lombok masih memiliki pengaruh yang cukup kuat, baik dalam politik, sosial dan budaya masyarakat adat suku Sasak, terutama di wilayah desa Puyung. Sistem kekerabatan patrilineal menempatkan posisi laki-laki sebagai pemegang kendali disemua aspek kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat menimbulkan suatu praduga terlebih kaitannya dalam proses reproduksi.

Realita saat ini menunjukkan bahwa kurangnya pemenuhan hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan maupun dalam menggunakan hak reproduksinya untuk menentukan kapan dan jumlah serta jeda waktu untuk memiliki anak. Perempuan pada keluarga bangsawan seakan terisolir dengan kekuasaan laki-laki. Dari hasil observasi peneliti bersama ketua RT kaitannya dengan relasi gender dalam hak reproduksi perempuan, dari 40 kepala keluarga terdapat 27 perempuan dalam keluarga tersebut yang tidak terlibat dalam hal membuat keputusan dalam menentukan jumlah dan jeda waktu untuk memiliki anak. Banyak sekali alasan dari kedua pihak mengenai hal tersebut akan tetapi hal yang paling mendasar ialah faktor pendidikan yang rendah dari perempuan ditambah minimnya informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Dalam penelitian (Qibtiyah, 2015) *Reathinking* Peran Perempuan Dalam Keluarga menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada fungsi dan peran laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak dipermasalahkan kalau memang merupakan pilihan yang dilakukan secara sadar dan tidak ada unsur keterpaksaan dan atau diskriminasi. Namun ketika dicermati lebih mendalam, perbedaan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender. Yakni salah satu jenis kelamin terutama yang banyak terjadi pada perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan. Penelitian (Ahmad, 2018) Relasi Gender Suami Istri Dalam Sudut Pandang Tokoh Aisyiyah menunjukkan bahwa Tipologi pandangan tokoh perempuan Aisyiyah tentang relasi gender suami istri dapat dikategorikan ke dalam tanggapan *apologis-transformasionis*, karena disatu sisi pandangan ini tetap setuju pada ketentuan fikih yang dianggap bias gender misalnya wali nikah, dan disisi lain tetap melakukan penafsiran ulang terhadap beberapa teks yang dianggap misogini ataupun bias gender. Sedangkan penelitian ini dilakukan guna memberikan informasi dan pengetahuan tentang relasi gender dan masalah hak reproduksi bagi perempuan.

Dari semua penjelasan di atas maka peneliti ingin melihat bagaimanakah relasi gender dalam hak reproduksi perempuan yang terjadi pada keluarga bangsawan di Desa Puyung Kec. Jonggat Lombok Tengah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dan informan. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Relasi Gender Dalam Keluarga Bangsawan.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga bangsawan yaitu laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, selanjutnya perempuan sebagai pengurus atau pengontrol rumah tangga. Hal ini terjadi karena kodrat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hasil temuan tersebut didukung oleh teori feminisme maxis yang menyatakan bahwa kodrat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan dalam keluarga bangsawan hanya bertugas membantu pekerjaan laki-laki di dalam rumah saja tanpa ikut berperan disosial masyarakat atau publik. Dalam (Pahlevi, 2022) adanya penindasan terhadap kaum perempuan dalam status atau kedudukan ekonomi. Menurut feminisme Marxis sendiri, ciri utama kekuasaan dan kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat adalah status ekonomi dan maskulin. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil temuan peneliti yang melihat adanya sebuah diskriminasi berupa penindasan kaum perempuan dalam status dan kedudukannya.

Posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga bangsawan tidak bisa sejajar karena dalam keluarga bangsawan jika perempuan yang lebih mendominasi dalam keluarga maka harga diri dan martabat laki-laki dianggap akan hilang. Perempuan dan laki-laki dalam keluarga bangsawan berperan sesuai dengan status sosialnya. Posisi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga bangsawan tidak ubahnya seperti teori sosial patron klien Scott dalam (Nurul, 2018) menyebutkan bahwa hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (*klien*). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, seperti jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan teori tersebut maka posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga bangsawan digambarkan dengan posisi laki-laki sebagai *patron* atau bos dan perempuan sebagai *klien* atau pekerja. Interaksi yang terjadi dalam keluarga bangsawan lebih menguntungkan kaum laki-laki dengan posisi dan statusnya dalam keluarga.

Dalam teori struktural fungsional baik laki-laki maupun perempuan memiliki status dan perannya masing-masing yang sesuai dengan kodratnya. Tohirin dalam (Sutiapermana, 2022). Pendapat tersebut sesuai dengan temuan peneliti yang menunjukkan bahwa peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga bangsawan ditentukan berdasarkan kodratnya. Pengambilan keputusan dan yang lainnya melibatkan peran perempuan, akan tetapi yang menentukan hasil keputusan tersebut adalah laki-laki dengan segala pertimbangan-pertimbangannya. Dalam hal perencanaan perempuan yang lebih banyak terlibat dengan melihat perannya di rumah tangga akan tetapi perempuan tidak berhak memberikan keputusan sepenuhnya mengingat posisinya dalam keluarga. Dalam hal ini alangkah lebih baik jikalau perempuanlah yang menentukan jeda waktu kapan memiliki anak dengan mempertimbangkan kesehatan reproduksinya sesuai penuturan informan 1 yang mengatakan bahwa jarak kelahiran yang terbaik ialah antara 5-6 tahun.

Selain itu segala bentuk perencanaan yang terjadi dalam keluarga akan lebih baik jika perempuan juga ikut andil didalamnya. Perempuan yang banyak tau segala masalah urusan rumah karena dialah yang mengontrol dan mengurusinya. Maka dari itu perempuan lebih berhak sebetulnya akan hal itu tapi kembali lagi ke masalah posisi perempuan dalam keluarga bangsawan. Pendapat di atas sesuai dengan asumsi dari Djunaedi dalam (Aziz, 2017) yaitu gender kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu kodrati. Misalnya peran laki-laki sebagai kepala keluarga atau peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik dan laki-laki dalam kerja publik. Dalam konteks keluarga bangsawan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Pendapat tersebut juga didukung oleh R. Collins dalam (Fujiati, 2014) yang mengatakan bahwa: 1) istri harus patuh dan menghormati suami, (2) segala kegiatan istri di luar harus seizin suami, dan (3) istri bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik. Oleh karena itu, secara sosial istri adalah warga kelas dua, inferior yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami). Inilah yang oleh Marx dan Engel, disebut dengan pola relasi materialist determinism. Menurut Marx dan Engel, dalam rumah tangga, suami sebagai cerminan kaum borjuis dan istri sebagai kaum proletar. Perempuan dalam keluarga bangsawan juga sesuai dengan teori tersebut dengan menggambarkan perempuan sebagai kaum proletar dan laki-laki sebagai kaum borjuis.

Perempuan harus patuh, tunduk, dan menghormati keputusan laki-laki sebagai bentuk kebaktian terhadap suami. Hal tersebut dianggap suatu hal yang lumrah saja dalam masyarakat keluarga bangsawan. Pada Indeks Barometer Sosial dalam (Chabibi, 2021) terdapat beberapa aspek yang menyebabkan ketimpangan gender. Di antaranya adalah harta benda, penghasilan, lingkungan tempat tinggal, kesejahteraan keluarga, kesehatan, tempat tinggal/rumah, kesempatan memperoleh pekerjaan, pendidikan, pengambilan keputusan yang terkait dengan kesejahteraan dirinya dan hukum. Dari penelusuran indeks barometer sosial tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat dalam keluarga bangsawan masih memiliki pemahaman dan keyakinan dalam membanding-bandingkan atas nama gender untuk sebuah posisi dan jenis pekerjaan. Selain itu latar belakang perempuan pada subjek penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dari kaum perempuan menjadi hal yang perlu diperhatikan, dimana kaum perempuan secara psikologi berasumsi bahwa laki-laki yang paling benar. Maka perempuan akan selalu berfikir dan bertindak atas dasar keputusan laki-laki.

3.2 Hak Reproduksi Perempuan Dalam Keluarga Bangsawan.

Hasil temuan peneliti dalam hak reproduksi perempuan menunjukkan bahwa perempuan seakan mengabaikan kesehatan sistem reproduksinya untuk memenuhi hasrat laki-laki. Perempuan akan dianggap berdosa jikalau tidak melayani suaminya. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga bangsawan yaitu karena masalah nafkah yang tidak tersalurkan dari laki-laki yang menyebabkan perubahan sikap dari laki-laki. Laki-laki cenderung lebih sensitif dan mudah emosi tidak ubahnya ketika perempuan dalam keadaan berhalangan atau menstruasi.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurhayati dalam (Laili, 2013) yang menyatakan bahwa berbicara tentang hak reproduksi perempuan juga termasuk di dalamnya adalah hak yang menyangkut kesehatan reproduksi perempuan tersebut. Diskusi tentang hak kesehatan dan kewenangan reproduksi perempuan lebih banyak disebabkan karena kontroversi tentang otoritas perempuan dalam dalam mengontrol tubuh, seksualitas dan alat serta fungsi reproduksinya. Kewenangan dan hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya sendiri banyak dikhawatirkan menyalahi tata aturan kultural, moral dan agama.

Dalam konteks interaksi antara suami dan istri, bagian ini menunjukkan bahwa seorang istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya, sebagaimana seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Keduanya seimbang dan bukan sama. Oleh karena itu, kebutuhan ini

membutuhkan kerjasama yang tepat. Meski tidak ketat, pembagian kerja yang adil antara suami dan istri memberikan kerja sama yang harmonis antara keduanya dan bahkan seluruh keluarga. Shihab dalam (Mintarsih, 2022). Dalam keluarga bangsawan interaksi antara suami istri dalam hak dan kewajiban tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga bangsawan masih dikendalikan oleh laki-laki. Perempuan dalam keluarga bangsawan jika membantah atau menolak keputusan suami maka akan dianggap berdosa.

Hak-hak perempuan pada umumnya dikesampingkan oleh kekuasaan laki-laki dalam keluarga bangsawan baik itu hak untuk memiliki anak, maupun hak untuk menentukan jeda waktu kapan memiliki anak. Perempuan dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan sepenuhnya, akan tetapi perempuan hanya bisa memberikan masukan atas keputusan laki-laki. Ketidakadilan gender dalam hal reproduksi bagi perempuan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah diatur dalam *International Conference On Population And Development (ICPD)* atau Konferensi Kependudukan Internasional dan UU No.39 Tahun1999 tentang HAM. (Petronela, 2021).

Sebagian besar masyarakat disana juga kurang begitu paham mengenai hak reproduksi perempuan. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi terkait kesehatan sistem reproduksi perempuan. Masyarakat di sana dalam hal kesehatan reproduksi lebih cenderung percaya pada tradisi yang sudah ada sejak dulu. seperti mengkonsumsi minuman-minuman tradisional dan menghindari makanan-makanan yang dianggap mengganggu sistem reproduksinya. Informasi mengenai kesehatan sistem reproduksi bagi perempuan tidak pernah disampaikan secara langsung akan tetapi yang lebih sering adalah masalah gizi buruk dan yang lainnya. Maka bagi masyarakat sekitar informasi tersebut masih dianggap suatu hal yang baru.

Dalam sasaran dan tujuan kesehatan reproduksi peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman dan dapat dipertanggung jawabkan, dimana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan Angka Kematian Ibu. Didalam memberikan pelayanan Kesehatan Reproduksi ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan. Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Pemenuhan hak reproduksi bagi perempuan dalam keluarga bangsawan pada dasarnya dikendalikan oleh kewenangan laki-laki. Perempuan akan tetap mengikuti dan menghormati keputusan laki-laki karena dirasa paling benar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa :

- 4.1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam keluarga bangsawan yaitu laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, selanjutnya perempuan sebagai pengurus atau pengontrol rumah tangga. Hal ini terjadi karena kodrat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sedangkan pengambilan keputusan dan yang lainnya melibatkan peran perempuan, akan tetapi yang menentukan hasil keputusan tersebut adalah laki-laki dengan segala pertimbangan-pertimbangannya. Dalam hal perencanaan perempuan yang lebih banyak terlibat dengan melihat perannya dirumah tangga akan tetapi perempuan tidak berhak memberikan keputusan sepenuhnya mengingat posisinya dalam keluarga.
- 4.4. Perempuan dalam pemenuhan hak reproduksi seakan mengabaikan kesehatan sistem reproduksinya untuk memenuhi hasrat laki-laki. Perempuan akan dianggap berdosa jikalau tidak melayani suaminya. Pemenuhan hak-hak perempuan pada umumnya dikesampingkan oleh kekuasaan laki-laki dalam keluarga bangsawan baik itu hak untuk memiliki anak, maupun hak untuk menentukan jeda waktu kapan memiliki anak. Perempuan dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan sepenuhnya, akan tetapi perempuan hanya bisa memberikan masukan atas keputusan laki-laki.

5. Saran

- 5.1 Bagi masyarakat Pedalaman desa Puyung akan lebih baik jika selalu melibatkan peran dan hak perempuan dalam proses perencanaan, penentuan keputusan yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi guna menciptakan keluarga yang harmoni tanpa mengedepankan sikap patriarkis dalam keluarga.
- 5.2 Bagi dinas kesehatan di sekitar lokasi penelitian alangkah baiknya mengadakan program sosialisasi 3 bulan sekali kaitannya dengan kesehatan reproduksi perempuan guna memberikan pemahaman akan pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan bagi masyarakat sekitar.
- 5.3 Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk melakukan penelitian pada relasi gender yang lain karena sangat layak untuk diteliti.

6. Ucapan Terimakasih

- 6.1 Bapak Dr. Hamidsyukrie ZM, M. Hum sebagai dosen pembimbing 1 dan bapak Drs. Suud, M. Si dosen pembimbing 2 yang telah sabar membimbing saya.
- 6.2 Dewan penguji ananda wahidah M.Pd yang juga turut andil dalam proses penyusunan tugas akhir (skripsi), melalui keritik dan saran serta masukan bagi penulis dengan baik.

Arif Rahman Hakim¹, Hamidsyukrie², Suud³. | Relasi Gender Dalam Pelaksanaan Hak Reproduksi Perempuan Pada Keluarga Bangsawan Di Desa Puyung Kec. Jonggat Lombok Tengah.

Referensi

- Arif syarif,Ahmad.2018. Relasi Gender Suami Istri Dari Sudut Pandang Tokoh Aisyiyah. Sulawesi. Jurnal Studi Gender Vol.13 No.1
- Aziz,Abdul. 2017. Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni. Bogor. Jurnal Haraka.
- Chabibi, Muhammad. 2021. Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki. Mojokerto. Jurnal Agama Dan Perbahasan Sosial Vol.5 No.1
- Faridl,Widhagdha Miftah.2022. *Case Study Approach Community Empowerment Research In Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. *Indonesian jurnal of social responsibility review (IJSRR)*.
- Fujiati. Danik.2014. Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis. Yogyakarta. MUWAZAH. Vol.6 No.1
- Laili,Khoirun Nida Fatma.2013. Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Di Indonesia. Jawa Tengah.PALASTREN. Vol.6 No.1
- Mintarsih, Mimin.2022. Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam. Bandung. Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol.9 No.1
- Nurl, Faizah Fitria. 2018. Hubungan Patron Klienblandong Dengan Mandor Hutan. Universitas Trunojoyo Madura. Jurnal Sosiologi. Vol.2 No.2.
- Petronela,Maria. 2021. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang. Jawa Tengah. Jurnal USM Law Review Vol.4 No.2
- Qibtiyah, Harun AR, Mariatul. 2015 *Reathinking* Peran Perempuan Dalam Keluarga. Pemekasan. Jurnal KARSA Vol. 23 No.1
- Sutiapermana, Aden.2022. Ketidakrelevanan Wacana Kesetaraan Gender Pada Islam Dalam Tinjauan Paradigma Struktural-fungsional. Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Of Islamic Studys* Vol.3 No.2.

Jurnal ARIF RAHMAN HAKIM.docx

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalfuda.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1%
3	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.unej.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1%
6	Albrecht. Encyclopedia of Disability Publication	<1%
7	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1%
8	id.123dok.com Internet Source	<1%
9	www.eprints.unram.ac.id Internet Source	<1%

10	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
11	docplayer.info Internet Source	<1 %
12	nttprogresif.com Internet Source	<1 %
13	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
14	lsej.org.ua Internet Source	<1 %
15	ejurnal.budiutomomalang.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On